



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

**PERIHAL
PERSELISIHAN HASIL PEMILIHAN UMUM ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN 2019 PROVINSI BANTEN DAN LAMPUNG**

**ACARA
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN**

JAKARTA,

RABU, 10 JULI 2019



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

RISALAH SIDANG

**PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019
PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019**

PERIHAL

Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2019 Provinsi Banten dan Lampung

PEMOHON

1. Partai Berkarya (Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
2. Partai Golongan Karya (Perkara Nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
3. Partai Hati Nurani Rakyat (Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)
4. Partai Keadilan Sejahtera (Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019)

ACARA

Pemeriksaan Pendahuluan

**Rabu, 10 Juli 2019, Pukul 16.01 - 17.11 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- 1) Aswanto
- 2) Saldi Isra
- 3) Manahan MP Sitompul

(Ketua)
(Anggota)
(Anggota)

**Muchtar Hadi
Fenny T. Purnamasari**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:

A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Martha Dinata
2. Isnaldi
3. Abdul Salam

B. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Dirzy Zaidan
2. Jayen Suwarsiatna
3. Muhammad Ridwan Ristomoyo

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Sidik Efendi
2. Sultan
3. Ampria Bukhori

D. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Sutikno
2. Fajar Maulana Yusuf

E. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dan 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Hendri Sita Ambar Kumalawati
2. Bagia Nugraha

F. Kuasa Hukum Termohon Perkara Nomor 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Taufik Hidayat
2. Imamul Mutaqin

G. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Teguh Prinaryanto
2. Wawan Setiawan

H. Kuasa Hukum Pihak Terkait Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019:

1. Ferry Anka Sugandar
2. Wiwin W. Windiantina
3. Kartono

I. Bawaslu:

1. Fatikhatul Khoiriyah
2. Iskardo P. Panggar
3. Tamri Suhaimi
4. Bella Oktaviana
5. Fritz Edward Siregar
6. Abhan
7. Nuryati Solapari
8. Ali Faisal
9. Sam'ani

SIDANG DIBUKA PUKUL 16.01 WIB

1. KETUA: ASWANTO

Sidang dalam Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Berkarya. Nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Golongan Karya. Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Hati Nurani Rakyat. Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Keadilan Sejahtera. Dibuka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Untuk selanjutnya, kami persilakan perkara nomor ... Kuasa Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 untuk memperkenalkan diri, siapa yang hadir pada kesempatan ini?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Assalamualaikum wr. wb. Terima kasih, Yang Mulia. Dari Perkara 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Pemohon hadir Kuasa Hukum 3 orang. Saya sendiri, Martha Dinata, kemudian rekan saya, Isnaldi, dan rekan saya, Abdul Salam. Demikian, Yang Mulia.

3. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Selanjutnya untuk Perkara Nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Golongan Karya. Ya, silakan! Belum hadir? Kuasa dari Partai Golongan Karya belum hadir, ya? Baik.

Kemudian untuk Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, silakan, Partai Hati Nurani Rakyat!

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

5. KETUA: ASWANTO

Walaikumsalam wr. wb.

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Kami dari Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, langsung di sini Kuasa, saya sendiri Dirzy Zaidan. Didampingi 2 rekan, Pak Jayen dan Pak Ridwan.

7. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya, Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Keadilan Sejahtera!

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Baik. Terima kasih, Majelis Hakim Yang Mulia. Perkenalkan ... assalamualaikum wr. wb. Saya Sidik Efendi. Bersama dengan 2 orang rekan saya dari Kuasa Hukum Perkara 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Saudara Sultan dengan Saudara Ampria Bukhori. Terima kasih, Majelis Yang Mulia.

9. KETUA: ASWANTO

Baik. Selanjutnya Pihak Termohon! Prinsipal atau Kuasa? Silakan!

10. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16 & 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SUTIKNO

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Nama saya Sutikno dari Kantor Absar, Bandung, dan Rekan, Kuasa Hukum dari tergugat dalam hal ini KPU RI untuk Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Hanura dan 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 PKS, bersama dengan rekan saya, Fajar Maulana Yusuf. Terima kasih.

11. KETUA: ASWANTO

Terima kasih. Dari kantor hukum lain masih ada yang jadi Kuasa?

12. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 169-04-16 & 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Ya, saya, Yang Mulia.

13. KETUA: ASWANTO

Ya, silakan!

14. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 169-04-16 & 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Terima kasih, Yang Mulia. Perkenalkan kami dari ... selaku Kuasa Hukum dari Termohon ... Pihak Termohon untuk Permohonan Nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh Partai Golkar dan 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Berkarya, telah hadir saya sendiri, Hendri Sita Ambar K., dan Bagia Nugraha.

15. KETUA: ASWANTO

Baik.

16. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 169-04-16 & 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: HENDRI SITA AMBAR KUMALAWATI

Terima Kasih.

17. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Masih ada dari kantor hukum lain?

18. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Ada, Yang Mulia.

19. KETUA: ASWANTO

Silakan!

20. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Ya. Kami dari Nurhadi Sigit Law Office, dalam hal ini kami selaku Kuasa dari KPU RI menangani khusus Permohonan yang diajukan oleh Partai Demokrat. Yang hadir hari ini adalah saya sendiri Taufik Hidayat, kemudian rekan saya di belakang, namanya Imamul Mutaqin. Demikian, terima kasih.

21. KETUA: ASWANTO

Perkara nomor berapa itu? Ini Demokrat pada sesi ini belum ada? Salah kamar? Enggak apa-apa. Dicek dulu nomor perkaranya. Untuk kesempatan ini, perkara yang pertama, Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 itu Partai Berkarya, 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Golongan Karya, Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Hati Nurani Rakyat, dan Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 Partai Keadilan Sejahtera.

Nah, kelihatannya ... yang mana ini? Oh, ini Bapak sesi yang pukul 19.00 WIB, setelah Salat Magrib, ya?

22. KUASA HUKUM TERMOHON PERKARA NOMOR 48-14-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TAUFIK HIDAYAT

Ya. Kami memang ... jadwal awal jam 19.00 WIB. Kemudian tadi jam 14.00 WIB dapat informasi bahwa untuk jam 19.00 WIB dimajukan jam 16.00 WIB. Makanya kami (...)

23. KETUA: ASWANTO

Informasi ini dari mana informasinya? Panel 3 itu, Pak. Panel 3, ini Panel 2. Ya, enggak apa-apa, kita maklumi. Kita maklumi terlalu banyak berkas yang dibawa dan terlalu banyak yang ditandatangani, jadi agak bingung.

Baik, terima kasih. Enggak apa-apa.

Baik, selanjutnya Bawaslu, Pak Fritz, silakan!

24. BAWASLU: FRITZ EDWARD SIREGAR

Yang Mulia, terima kasih. Assalamualaikum wr. wb. Kami hari ini di ... di samping saya ada Ibu Fatikhatul Khoiriyah (Ketua Bawaslu Lampung), kemudian Pak Iskardo P. Panggar (Anggota Bawaslu Lampung), Pak Tamri Suhaimi (Anggota Bawaslu Lampung), Ibu Bella Oktaviana (Staf Pendamping), dan saya Fritz Edward Siregar (Anggota Bawaslu RI). Dan juga ada ... saya mendapat kabar bahwa teman-teman dari Banten juga ada di sini, Pak. Karenanya ada beberapa kasus yang akan kita lanjutkan pada sore hari ini. Terima kasih.

25. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih, Pak. Selanjutnya untuk Pihak Terkait disampaikan terkait untuk nomor perkara berapa?

26. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEGUH PRINARYANTO

Terima kasih, Yang Mulia. Izin memperkenalkan diri, kami (...)

27. KETUA: ASWANTO

Tapi sebelumnya sudah ada permohonan, Pak, ya?

28. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEGUH PRINARYANTO

Sudah (...)

29. KETUA: ASWANTO

Sudah ada permohonan sebagai Pihak Terkait, ya?

30. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEGUH PRINARYANTO

Sudah kami terima. Siap.

31. KETUA: ASWANTO

Semua, ya? Baik.

32. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: TEGUH PRINARYANTO

Untuk kami sudah. Yang lain saya tidak tahu, Yang Mulia.
Izin untuk Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, kami mewakili Pihak Terkait. Saya dengan Teguh Prinaryanto dan rekan saya, Wawan Setiawan. Terima kasih, Yang Mulia.

33. KETUA: ASWANTO

Baik, terima kasih. Selanjutnya, Pihak Terkait? Silakan!

34. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Kami dari Pihak Terkait Nomor Perkara 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019.

Ada Pak Ferry Anka Sugandar, kemudian saya sendiri Windiantina, dan Pak Kartono. Terima kasih, Yang Mulia.

35. KETUA: ASWANTO

Baik. Sudah memasukkan juga surat Permohonan sebagai Pihak Terkait, ya?

36. KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: WIWIN W. WINDIANTINA

Sudah ... sudah, Yang Mulia, sudah.

37. KETUA: ASWANTO

Berarti sudah ... sudah semua, ya? Tim Saudara 3, tim yang tadi 2 orang.

Baik, sebelum kita memeriksa perkara ini, kami ingin menginformasikan beberapa hal. Pertama bahwa perkara-perkara yang kita akan sidangkan pada saat ini, itu perkara yang sudah kami lakukan gelar perkara, sehingga Panel sudah paham apa yang ada di dalam Permohonan Ibu, Bapak. Oleh sebab itu, kita berharap bahwa yang disampaikan pada kesempatan ini, cukup pokok-pokoknya saja, ya! Tidak perlu dibacakan semua! Itu yang pertama.

Yang kedua, kita selalu mengingatkan bahwa permohonan yang dibacakan atau dipresentasikan itu adalah permohonan yang diterima oleh MK paling lambat tanggal 31 Mei. Jadi, kalau ada perbaikan ... perbaikan yang tidak melewati waktu 31 Mei. Kalau tidak ada perbaikan, berarti yang Saudara bacakan adalah permohonan tanggal 24 Mei. Di luar itu untuk sementara ditutup saja dulu karena kita sudah sepakat bahwa yang kita akan pertimbangkan adalah permohonan yang disampaikan tidak lewat tanggal 31 Mei. Jelas, ya?

Baik, silakan untuk perkara yang pertama akan dipandu oleh Yang Mulia Bapak Dr. Manahan. Silakan! Untuk seluruhnya pada sesi ini, Yang Mulia. Silakan!

38. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, sebelum saya beri kesempatan kepada Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, ya, dari Partai Berkarya. Ini saya mau konfirmasi dulu mengenai Surat Kuasa. Ini ada 2 ini nomor Surat Kuasa di dalam Permohonan ini. Di Permohonan awal yang tertanggal 24, itu Surat Kuasa K001, sedangkan di Permohonan yang perbaikan, yang tanggal 23, sebetulnya nomornya saja atau memang ada kesalahan ini? Karena di sini K008 yang perbaikan.

39. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Mohon izin, Yang Mulia. Untuk di Surat Kuasa 001, pada saat itu kuasa hukum hanya 13 orang, kemudian setelah memasukkan kembali itu kita ... mohon izin, ada 18 orang ... 17 orang. Pada 008 menjadi 13, Yang Mulia. Jadi, memang ada ... ada perbaikan lebih kepada penambahan ... pengurangan daripada kuasa hukum, Yang Mulia.

40. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Saya kira bukan soal penambahan ini. Nomor saja ini nampaknya karena di nomor 001=13, sedangkan 008 juga hanya juga 13, namanya juga itu. Jadi, saya kira mengenai soal nomor, ya? Dikoreksi nanti. Dikoreksi saja!

41. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Baik. Yang betul 008, Yang Mulia.

42. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

008?

43. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Ya.

44. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Namun, ini yang 001 yang di surat kuasa?

45. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Ya, yang pertama tadi.

46. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berarti ini yang diperbaiki, ya?

47. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Baik. Siap, Yang Mulia.

48. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, 008. Baik, dipersilakan siapa yang mau menyampaikan? Di sini ada 13 orang yang hadir tadi, siapa ini?

49. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Saya Martha Dinata, kemudian Isnaldi, dan Abdul Salam.

50. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Abdul Salam. Baik, silakan kepada Saudara Martha Dinata!

51. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Baik, terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

Langsung kita bacakan kepada Pokok Permohonan dari Partai Berkarya untuk Kabupaten Pandeglang V untuk pengisian keanggotaan DPRD Provinsi Banten.

Bahwa telah terjadi di Pandeglang, Dapil V, khususnya untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota, telah terjadi pengurangan suara pada Pemohon dan adanya penambahan suara ke Partai Amanat Nasional.

Bahwa atas terjadinya kecurangan tersebut, Pemohon tidak bersedia untuk menanta ... menandatangani Formulir DB-2 KPU dengan Berita Acara seperti kami sebutkan dalam Bukti P-75. Bahwa pem ... bahwa berdasarkan Formulir C-1 DPRD kabupaten/kota yang dimiliki Pemohon terdapat selisih perolehan suara dibandingkan dengan Formulir DB Model DAA-1 DPRD kabupaten/kota yang dimiliki Termohon, dimana perolehan suara Pemohon yang benar berdasarkan Formulir C-1 DPRD kabupaten/kota adalah sebanyak 5.916 suara, sedangkan dalam Formulir Model DAA-1 DPRD kabupaten/kota yang ditetapkan oleh Termohon, perolehan suara Pemohon adalah sebanyak 5.875 suara. Maka ada terdapat selisih perolehan suara sebanyak 41 suara yang kami sandingkan melalui tabel 1 untuk membandingkan DAA-1 dengan C-1 Pemohon. DAA-1 Termohon dengan C-1 Pemohon, dimana ada pengurangan suara Pemohon sebanyak 41.

Hal ini juga kami dalilkan kembali dengan lebih runut untuk kecamatan masing-masing TPS untuk 4 kecamatan di Dapil Pandeglang V, yaitu Kecamatan Labuan TPS 17. Persandingan antara DAA-1 Termohon sebanyak 23, C-1 Pemohon sebanyak 25, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara. Pada Kecamatan Patia TPS 0 ... Desa Turus TPS 03 perolehan suara Termohon berdasarkan DAA-1 adalah sebanyak 2 suara, berdasarkan C-1 Pemohon=4 suara, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 2 suara. Sedangkan untuk TPS 05, berdasarkan DAA-1 Termohon perolehan suara sebanyak 4 suara, berdasarkan C-1 Pemohon=8 suara, dan terdapat 4 pengurangan suara Pemohon.

Tiga. Kecamatan Sukaresmi untuk TPS 12 Desa Sukaresmi, berdasarkan DAA-1 Termohon=1 suara, berdasarkan C-1 Pemohon sebanyak 2 suara, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 1 suara. Untuk TPS 03, berdasarkan DAA-1 Termohon sebanyak 3 suara, berdasarkan C-1 Pemohon=6 suara, sehingga terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara. Untuk Desa Cibungur TPS 03, masih di Kecamatan Sukaresmi, berdasarkan DAA-1 Termohon=3 suara, berdasarkan C-1 Pemohon sebanyak 6 suara, terdapat pengurangan suara pada Pemohon sebanyak 3 suara.

Empat. Untuk Kecamatan Carita di TPS 06, DAA-1 Termohon sebanyak 5 suara, C-1 Pemohon sebanyak 8 suara, terjadi pengurangan suara Pemohon sebanyak 3 suara. Untuk TPS 04 Desa Pejamben, DAA-1 Termohon=3 suara, C-1 Pemohon sebanyak 25 suara, terdapat pengurangan suara Pemohon sebanyak 22.

Bahwa berdasarkan Formulir C-1 DPRD kabupaten yang dimiliki oleh Pemohon terdapat penambahan suara pada Partai Amanat Nasional sebanyak 50 suara. Sehingga perolehan suara Amanat ... Partai Amanat Nasional yang ditetapkan oleh Termohon berdasarkan Formulir DAA-1 DPRD kabupaten/kota adalah sebanyak 5.896 suara, yang seharusnya berdasarkan pada Formulir C-1 DPRD kabupaten/kota yang dimiliki oleh Pemohon perolehan suara Partai Amanat Nasional adalah sebanyak 5.846 suara.

Kita kembali persandingkan suara yang telah kami sebutkan dalilkan di atas, sebanyak ... pada tabel 3. Bahwa perolehan suara Partai Amanat Nasional berdasarkan DAA-1=5.896, berdasarkan C-1 Pemohon adalah 5.846 suara, ada penambahan 50 suara pada Partai Amanat Nasional.

Kemudian untuk Kecamatan Patia, kami juga detailkan kembali pada masing-masing desa untuk seluruh TPS yang ada di tidak ... untuk sebagian TPS yang kami temukan terdapat selisih antara DAA-1 dengan C-1 Pemohon. Untuk Desa Simpang Tiga TPS 07, DAA-1 Termohon ada 21 suara, Pemoho ... C-1 Pemohon=20 suara, terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 1 suara.

Kemudian untuk Kecamatan Carita ada 3 TPS, dimana DAA-1 untuk Desa Sukajadi TPS 05, untuk Termohon adalah 5 suara, berdasarkan Pemo ... C-1 yang ada pada Pemohon adalah 0, sehingga terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 5 suara.

Untuk TPS 10 Desa Banjarmasin, berdasarkan DAA-1 Termohon=5 suara, namun berdasarkan C-1 Pemohon hanya 3 suara, sehingga terdapat penambahan suara pada Partai Amanat Nasional sebanyak 2 suara.

Untuk TPS 03 Desa Sukanegara, DAA-1 Termohon=3 suara, berdasarkan temuan C-1 pa ... oleh Pemohon hanya 0, sehingga terdapat penambahan 3 suara.

Kemudian, kami jabarkan untuk Kecamatan Pagelaran di Kecamatan Pagelaran, Desa Marga ... Margagiri TPS 04, DAA-1 Termohon sebanyak 6 suara, namun berdasarkan temuan C-1 kami sebagai Pemohon=0, sehingga terdapat penambahan suara Partai Amanat Nasional sebanyak 6 suara.

Untuk TPS 11 Desa Margasana, berdasarkan DAA-1 Termohon=3 suara, namun temuan C-1 pada Pemohon=0, sehingga terdapat penambahan suara pada Partai Amanat Nasional sebanyak 3 suara.

Model terakhir kami ... berdasarkan temuan C-1 kami sebagai Pemohon di Kecamatan Labuan untuk TPS 05 Desa Banyumekar, berdasarkan DAA-1 Termohon tertulis 49 suara, C-1 Pemohon hanya 19 suara, sehingga terjadi penambahan suara pada Partai Amanat Nasional sebanyak 30.

Dalam hal ini kami memohonkan atau mem ... menyatakan Petitum, antara lain:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V/2019 seterusnya kami anggap dibacakan.
3. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPRD, DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan, sebagai berikut:
 - a. Perolehan suara Partai Berkarya Kabupaten Kota Pandenglang, Dapil V, 5.000 ... sebanyak 5.916. Kami jabarkan, namun kami anggap dibacakan di tabel selanjutnya, Yang Mulia.

52. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, kecamatannya enggak usah lagi dibacakan.

53. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Dan b, perolehan suara Pemohon Partai Amanat Nasional untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota sebanyak 5 ... 5.846. Dan

mohon izin, untuk yang ini, Yang Mulia, kalau bisa kami merenvoi karena ini ada kesalahan penulisan. Ada 2 table, padahal sama angkanya. Ini maksudnya hanya 1.

54. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

1, ya?

55. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Ya.

56. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, yang mana ini yang mau dicoret?

57. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Sama, Yang Mulia, yang kiri maupun yang kanan.

58. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya.

59. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Sebetulnya hanya 1 ... 1 kolom, gitu.

60. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh, ya. Jadi yang di tengah-tengah sebetulnya enggak perlu itu ada, ya?

61. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Ya. Baik (...)

62. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

63. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Terima kasih, Yang Mulia.

Kemudian 4, memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Yang Mulia.

64. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Saudara Martha Dinata sudah membacakan. Namun, ada 13 kuasa cuman 4 yang menandatangani. Untung Pak Martha Dinata ikut menandatangani, kalau ndak nanti ndak bisa membaca.

Nah, untuk Permohonan ini kita kira ndak ada lagi yang mau dikoreksi, hanya surat di dalam Permohonan ini nanti ... di dalam Surat Kuasa nanti perbaiki, ya, yang nomornya?

65. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Siap, Yang Mulia.

66. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada yang ingin disampaikan? Cukup.

Baik untuk Permohonan ini dari Berkarya Nomor 200 ... ada?

67. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu semua yang didalilkan TPS-TPS itu ada buktinya semua?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Siap, Yang Mulia. Sudah kami sampaikan di daftar bukti. Semuanya berbentuk fisik, buktinya kita tampilkan, seperti yang saya sebutkan di dalam table.

69. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Semuanya? Seluruh ... yang di dalam tabel itu sudah ada buktinya, ya?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Siap, Yang Mulia.

71. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sama nantinya gunanya begini karena di Permohonan Saudara itu kan tidak menyebutkan. Ini tabel ini bukti P sekian dan segala macamnya itu.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Siap, Yang Mulia.

73. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi nanti kita tinggal membandingkan, ini yang Saudara dalilkan, nah kita sandingkan dengan punya Termohon. Jangan-jangan ini ... ini di sini 2, di sini ternyata ditulis 3. Nah, kan kita mau lihat ini, mana yang benar? Lalu kan Bawaslu ada juga nanti, Pihak Terkait ada juga. Tetap sandingkan saja, maka paling penting sebetulnya dalam perkara seperti ini adalah bukti-bukti tertulis itu.

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Siap. Insya Allah, Yang Mulia, semua yang kami sebutkan di dalam tabel persandingan kami memiliki Bukti C-1.

75. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti di situ jawabnya insya Allah juga. Jadi insya Allah, insya Allah itu yang akan kami ukur semua, ya?

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: MARTHA DINATA

Terima kasih, Yang Mulia.

77. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, terima kasih, Yang Mulia.

78. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, ya, kita lanjut ke Perkara Nomor 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Partai Golongan Karya. Belum hadir, ya? Baik, nanti kita tunggu sampai akhir persidangan ini, kalau memang tidak hadir nanti enggak berakhirnya ... selesai persidangan dianggap tidak serius.

Oleh karena itu, kita beranjak ke Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Hanura. Silakan! Siapa yang membacakan? Ada di sini Kuasanya, Abdulkadir, Tabrani Abby, sampai ada berapa orang ini? Petrus Selestinus, Agus Abdulah, Jayen Suwarsiatna, dan seterusnya, dan yang menandatangani ada ... cuma 4 orang ... 5 orang. Ini siapa yang hadir?

79. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Terima kasih, Yang Mulia. Kebetulan kuasa saya Dirzy Zaidan di situ, Yang Mulia.

80. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dir ... Dirzy Zaidan?

81. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Betul, Yang Mulia.

82. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Hadir, ya?

83. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Hadir, saya sendiri, Yang Mulia.

84. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke. Dipersilakan.

85. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Terima kasih. Untuk Perkara Nomor 35/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 kami bacakan pokok-pokoknya. Kedudukan Hukum kami anggap dibacakan. Tenggang Waktu ... Tenggang Waktu bahwa Permohonan mengajukan permohonan penyelaksanaan (...)

86. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Langsung saja pokok-pokok permohonan!

87. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Pokok ... Tenggang Waktu dianggap dibacakan. Tak ... takutnya nanti lewat, Yang Mulia. Dianggap dibacakan saja, Yang Mulia?

88. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu Anda 2 dapil, ya?

89. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ada 2 dapil.

90. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah yang mana dulu yang mau dibacakan? Karena ada (...)

91. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ko ... Kota Tangerang ... Tangerang Selatan.

92. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tangerang Selatan. Ini pastikan dulu ini karena (...)

93. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Insya Allah, pasti, Yang Mulia.

94. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Insya Allah, ya, yang mana Tangerang Selatan? Yang ini?

95. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ya, betul, betul.

96. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke, silakan!

97. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, Tangerang Selatan, Dapil VI, ya?

98. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

VI.

99. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dipersilakan!

100. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Bahwa terjadi penambahan atau penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di 4 Tempat Pemungutan Suara (TPS) di daerah pemilihan Kota Tangerang Selatan. 6 Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cireundeu sebanyak 25 suara dikarenakan selisih perbedaan perselisihan suara antara C-1 dengan DAA-1 terjadi di beberapa TPS. Untuk di beberapa TPS, tidak kami bacakan.

101. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

102. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Nanti dijelaskan di situ, lengkap, Yang Mulia.

103. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, lanjut!

104. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Yang kedua bahwa terjadi penambahan penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di 4 pemungutan suara, di daerah pemilihan Kota Tangerang, 6 Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pesanggrahan sebanyak 19 suara dikarenakan ... dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C-1 dan DAA-1, terjadi di beberapa TPS.

Yang ketiga bahwa terjadi penambahan penggelembungan perselisihan suara Partai Kebangkitan Bangsa di 10 tempat pemungutan suara, di daerah pemilihan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rempoa sebanyak 111 suara dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C-1 dan DAA-1, penjelasan di bawah, dianggap dibacakan.

105. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi, di halaman 7-nya itu Anda tidak menyebutkan 10-nya kan? Yang 1.1.3 itu, di mana ada angka 10-nya itu?

106. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Angka 10 yang mana, Majelis?

107. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tadikan disebutkan 10 bahwa terjadi di 10 (...)

108. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

19 itu ada di TPS 32=7, di TPS 65 ada 4, tapi enggak kita jumlahkan di situ. Jadi per TPS kita perjelaskan di situ, Yang Mulia.

109. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi (...)

110. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Biar Yang Mulia nanti yang menjumlah, tahun ini.

111. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Masa kita pula yang mau menjumlah itu?

112. KETUA: ASWANTO

Anda yang terima honorinya, kita yang disuruh kerja ini.

113. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Tapi di tabel itu ada, Yang Mulia. Di tabel ada, Yang Mulia.

114. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tabel berapa itu? Tabel ini agak gelap ini. Nomor ... tabel di halaman berapa?

115. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Di halaman 8.

116. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, judul tabelnya gelap.

117. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ya, memang fotokopi, Yang Mulia, agak gelap sedikit. Lagi hati gelap, Yang Mulia.

118. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

119. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Lanjut, Yang Mulia. Yang keempat bahwa terjadi penambahan penggelembungan perolehan suara Partai Kebangkitan Bangsa di 2 pemungutan suara, di daerah pemilihan Kota Tangerang Selatan, 6 Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Rengas sebanyak 14 suara dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C-1 dan DAA-1, terjadi di beberapa TPS. Ada 2 penjelasan, dianggap dibacakan, Ketua.

Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat di 6 tempat pemungutan suara, di daerah pemilihan Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Cireundeu sebanyak 25 suara dikarenakan selisih perolehan suara antara C-1 dan DAA-1, terjadi di beberapa TPS.

Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara Partai Hati Nurani Rakyat di 7 tempat pemungutan suara di daerah pemilihan Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Pisangan sebanyak 25 suara dikarenakan selisih perbedaan perolehan suara antara C-1 dan DAA-1, terjadi di beberapa TPS. Penjelasan semua di bawah.

Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara sah caleg dan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat di tempat pemungutan suara di daerah pemilihan Dapil Kota Tangerang Selatan, Kelurahan Rempoa sebanyak 45 suara dikarenakan selisih perbedaan suara C-1 dan DAA-1, terjadi di TPS, sebagai berikut, dianggap dibacakan, Yang Mulia.

120. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

121. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Bahwa terjadi pengurangan perolehan total suara sah caleg dan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat di 1 tempat pemungutan suara, di daerah pemilihan kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, Kelurahan Cire[Sic!] sebanyak 1 suara dikarenakan selisih perbedaan suara antara C-1 dan DAA-1.

122. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Itu halaman berapa yang Anda bacakan itu?

123. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Halaman 17.

Bahwa dengan reka ...rekapitulasi tersebut, dapat disimpulkan bahwa perolehan suara sah Partai PKB secara keseluruhan yang tertera pada Form Model DA-1 DPRD kabupaten/kota secara total=7.055, telah terjadi penambahan sejumlah 169 suara. Yang artinya, total perolehan suara sah Partai PKB secara keseluruhan untuk Pemilu Calon Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan daerah pemilihan Dapil Kota Tangerang Selatan, Kecamatan Ciputat Timur, seharusnya adalah 6.886 suara. Sedangkan rekapitulasi hasil pleno kecamatan di PPK Ciputat Timur yang dikeluarkan melalui output Form Model DA-1 DPRD kabupaten/kota yang menampilkan total perolehan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat secara total adalah 6.908 suara. Telah ditemukan kekurangan suara sebanyak 118 suara, sehingga total perolehan suara sah Partai Hati Nurani Rakyat yang benar adalah 7.026 suara.

Petitem. Bahwa berdasarkan seluruh uraian sebagaimana di atas tersebut, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi Indonesia untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

Membatalkan Keputusan KPU (Komisi Pemilihan Umum) Nomor 987 seterusnya, tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada Hari Senin tanggal 21 Mei 2019.

B. Menganulir hasil pleno perolehan suara pemilihan umum pada kategori Pemilihan Legislatif Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Kota Tangerang Selatan, daerah pemilihan Kota Tangerang Selatan VI, Kecamatan Ciputat Timur.

C. Memerintah kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Tangerang Selatan, Panwaslu Kota Tangerang Selatan, Panitia Pengawas Pemilu Ciputat Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Ciputat Timur untuk melakukan perbaikan perubahan perolehan suara sah sesuai daftar isian yang diajukan Pemohon untuk melakukan supervisi dan pengawasan terhadap pelaksanaan ini.

Bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon seadil-adilnya. Terima kasih, Yang Mulia. Itu Pokok Permohonan kami. Wassalamualaikum wr. wb.

124. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, di sini yang terakhir rekapitulasi penghitungan suara ulang. Itu, ya, Permohonan Anda, ya?

125. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Betul, Yang Mulia.

126. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

127. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Jadi merekap sesuai dengan hasil yang (...)

128. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

129. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

688 jadi 7.026, Yang Mulia.

130. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cuma dalam poin A ini yang kita agak kaget ini. Membatalkan seluruh itu (...)

131. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ya.

132. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

SK KPU itu.

133. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Keputusan, ya. Karena (...)

134. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, jadi itu (...)

135. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ya.

136. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Keputusan untuk presiden pun batal semua itu (...)

137. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Enggak.

138. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Dalam Permohonan Saudara. Jadi, makanya hati-hati (...)

139. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Karena saya ... ya (...)

140. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Karena Anda di sini tidak membuat suatu apa ... sepanjang atau batas daripada berlakunya Keputusan KPU Nomor 987 itu, ya. Hanya namun di B-nya, Saudara mengatakan, "Menganulir hasil pleno," ya?

141. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ya, ya, Majelis.

142. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nah, makanya itu menjadi catatan lah.

143. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ya, Majelis.

144. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada lagi?

145. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Cukup, Yang Mulia.

146. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Cukup, ya? (...)

147. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ini ada lanjut yang (...)

148. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oh.

149. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Yang kedua (...)

150. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oh, yang, ini ... ini masih ada di sini. Kok Anda pula bilang cukupnya?

151. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tunggu dahulu!
Ya, silakan!

152. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, makanya, ini ada kalau yang di sana bicara, kita mengatur, tapi Anda ndak boleh mengatur Hakim.

153. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Siap.

154. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

155. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Siap, Mulia.

156. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, inikan 2 saja pokok soal, ya, pokok soal Saudara, ya. Ada kelebihan suara PKB?

157. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ya.

158. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sehingga jumlahnya lebih besar daripada calon Anda kan, partai Anda? Lalu ada kekurangan suara Anda. Apakah suara yang berlebih dari PKB itu bisa Anda buktikan karena itu suara Anda pindah ke sana?

159. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Semua kami buktikan di sini, Yang Mulia. Semua ada buktinya, kami buktikan (...)

160. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

161. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Semua di sini, Yang Mulia.

162. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nanti (...)

163. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Lengkap di sini kami buktikan (...)

164. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, nanti kita lihat, saya kan menanya saja.

165. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ya, lengkap (...)

166. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kalau orang mendalilkan (...)

167. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Lengkap kita buktikan (...)

168. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Namanya juga usaha kan (...)

169. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Insya Allah, Yang Mulia. Selagi masih ada jalan, Yang Mulia.

170. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu. Jangan Anda mengajukan permohonan ke Tuhan saja nanti. Nah, ini susahnyanya kan kalau orang kalah di sini, pergi ke sini, pergi ke sini, nah itu jadi repot jadinya.

171. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Alhamdulillah, enggak, Yang Mulia.

172. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, ya. Itu saja, kalau itu nanti kita akan periksa, sebab itu disandingkan juga yang di sebelah sini.
Terima kasih, Yang Mulia.

173. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, tadi ada yang mau disampaikan lagi?

174. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Sudah cukup. Lanjut yang di Dapil II, Yang Mulia.

175. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini yang dapil lain lagi?

176. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: DIRZY ZAIDAN

Ya, Kabupaten Tangerang.

177. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, dapil yang mana ini?

178. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Kabupaten.

179. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kab (...)

180. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Dapil Kabupaten Tangerang, ya.

181. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Kabupaten Tangerang, ya?

182. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Ya, Dapil I

183. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, dipersilakan! Di Permohonan ini juga atau ada permo (...)

184. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Permohonan yang berbeda, Yang Mulia.

185. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Berbeda? Ya. Baik, dipersilakan!

186. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Baik.

187. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ini Saudara siapa namanya?

188. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Saya Jayen Suwarsiatna, Yang Mulia.

189. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada namanya?

190. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Ada, Yang Mulia.

191. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

menandatangani juga, ya?

192. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Ada, Yang Mulia.

193. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Silakan!

194. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian pada perolehan kursi anggota DPRD Kabupaten Tangerang di beberapa Daerah Pemilihan I, serta perolehan suara yang benar pengurus ... ber ... pada ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan, diikuti. Bahwa perolehan suara Partai Nasdem berdasarkan persandingan bukti C-1 dan DAA-1 dengan tambahan suara se ... dengan pertambahan suara=241.

Satu, perolehan suara Pemohon atau partai politik di Kabupaten Tangerang untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten.

Dua, perolehan partai pemu perolehan ... eh, Pemohon atau partai politik meyajikan dan menjelaskan perolehan suara menurut Termohon dibandingkan dengan perolehan suara menurut Pemohon hanya pada dapil yang dimohonkan.

Petitem. Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Pemohon ... Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menetapkan hasil perolehan suara yang benar untuk Pemohon dalam rekapitulasi suara ... hasil suara untuk anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tangerang di Daerah Pemilihan I, serta perolehan ... serta perolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk dilakukan dalam pen

... penentuan perolehan kursi anggota DPRD kabupaten sebagai berikut.

Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. Terima kasih.

195. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Jadi, yang dipermasalahkan adanya pengurangan suara dari Hanura dan yang menurut tabel ini, itu di ... diberikan ... dipindahkan kepada Nasdem?

196. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Betul, Yang Mulia.

197. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Seperti itu, ya?

198. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Seperti itu, Yang Mulia.

199. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tapi, kok di dalam Petikum ndak ada? Ya, tapi okelah. Kita sudah mendengarkan apakah ... ada lagi? Dapil yang lain? Cukup. Dari Permohonan Hanura Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 ini sudah cukup?

200. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Izin, Yang Mulia. Kita buat Tangerang Selatan mau menambahkan bukti tambahan.

201. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ada bukti yang mau di (...)

202. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Tambahkan.

203. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Diajukan?

204. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Ya, buat Tangerang Selatan, Dapil VI.

205. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Nanti diserahkan ke (...)

206. KETUA: ASWANTO

Sudah dibawa sekarang?

207. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Atau anu (...)

208. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Sudah, Yang Mulia.

209. KETUA: ASWANTO

Sudah dianu ... leges?

210. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Sudah dileges, tapi belum diperbanyak, Yang Mulia.

211. KETUA: ASWANTO

Baik, diperbanyak dulu.

212. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Baik. Terima kasih, Yang Mulia.

213. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, kita ber ... beralih ke Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari PKS. Dipersilakan, yang membacakannya siapa?

214. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Baik. Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Kami dari Kuasa Hukum Partai Keadilan Sejahtera Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 akan membacakan pada Pokok Permohonan. Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar (...)

215. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Namanya siapa ini?

216. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Nama Sidik Efendi.

217. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidik Efendi? Ada dalam Surat Kuasa?

218. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ada, Yang Mulia.

219. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Menandatangani Permohonan?

220. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya.

221. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Sidik Efendi? Ya, dipersilakan!

222. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Bahwa perolehan suara Pemohon yang benar untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro, Daerah Pemilihan IV adalah sebagai berikut.

Persandingan perolehan suara partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD Kota Metro. Bahwa Pemohon PKS menyandingkan dan menjelaskan selisih perolehan suara disertai alat bukti hanya pada dapil yang dimohonkan dalam tabel sebagai berikut.

Satu. Partai PKS menurut per ... perolehan suara menurut Termohon sebesar 5.138, sedangkan menurut Pemohon=5.140, selisih=2. Kemudian perolehan Partai PKB menurut Termohon=1.713, sedangkan menurut Pemohon adalah 1.711, selisih=2 suara. Bahwa mengenai selisih suara di atas, Pemohon mendalilkan sebagai berikut.

TPS 2, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan. Satu. Bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 2, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan sebanyak 1 suara dikarenakan adanya pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang, dalam hal ini terlihat berbandingan formulir pada Model C-1 DPRD kota, Pemohon, sebagaimana Bukti P-1 dengan Formulir Model DAA-1 DPRD kabupaten/kota, Termohon, pada Bukti P-2 sebagai berikut.

Perolehan suara Partai PKS berdasarkan Termohon di DAA-1=39, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan C-1 adalah 40, selisih=1 suara. Sedangkan suara PKB menurut Termohon berdasarkan DAA-1 adalah 33, sedangkan menurut Pemohon adalah 32 berdasarkan C-1, selisih=1.

Dua. Bahwa telah terjadi pembukaan kotak suara pada TPS 2, Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan. Saat Pleno tersebut, saksi PKS mengajukan keberatan atas pembukaan kotak suara untuk menghitung kembali perolehan suara. Penolakan saksi PKS dilakukan karena antara C-1 milik Pemohon, vide Bukti P-1 dan C-1 Plano Bukti P-3, serta C-1 milik pengawas pemilu isinya sama dan tidak ada form keberatan atau kejadian khusus yang tercatat ketika proses penghitungan di tingkat PPK pada saat rekapitulasi Kelurahan Margorejo berdasarkan DAA-1 yang dapat dijadikan dasar untuk melakukan pembukaan kotak suara dan penghitungan ulang surat suara. Untuk hal ini, saksi PKS mengajukan keberatan sesuai dengan Bukti P-4.

Ketiga. Bahwa berdasarkan Pasal 22 PKPU Nomor 4 Tahun 2019 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara dan Penetapan Hasil Penghitungan Pemilihan Umum, selanjutnya disebut PKPU Nomor 4/2019, maka dalam hal terdapat keberatan saksi atau panwas kecamatan, seharusnya yang dilakukan PPK adalah menjelaskan prosedur dan/atau mencocokkan selisih rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara dengan Formulir Model C-1 Plano DPRD kabupaten/kota, bukan dengan membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara.

Empat. Bahwa pada saat pembukaan kotak suara dan penghitungan surat suara ulang tersebut, telah terjadi pelanggaran prosedur lainnya, yaitu surat suara yang seharusnya hanya boleh dipegang oleh PPK, namun pada faktanya justru dipegang-pegang oleh orang-orang yang tidak memiliki kewenangan, yaitu beberapa saksi partai politik, bahkan surat suara tersebut sempat dibawa ke area yang tidak steril. Akhirnya surat suara yang tadinya tidak tercoblos, tetapi setelah dibawa ke belakang oleh saksi, surat suara tersebut menjadi tercoblos, dan menjadikan penambahan suara PKB sebanyak 1 suara.

Kelima. Bahwa kejadian tersebut telah melanggar Ketentuan Pasal 11 jo Pasal 16 jo Pasal 17, sampai 21, PKPU Nomor 4/2019, yang pada intinya mengatur bahwa yang bertugas melakukan rekapitulasi hanya petugas PPK dibantu oleh petugas PPS

TPS 9, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan. Enam. Bahwa di TPS 9, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan, Pemohon mengajukan koreksi kepada PPK atas jumlah suara Partai Nomor 1, yaitu PKB, yang diklaim, yaitu bukanlah 7 suara, tetapi seharusnya suara PKB hanya 4 suara. Hal ini berdasarkan salinan hasil penghitungan suara Model C-1 milik Pemohon, Bukti P-5, foto data rincian perolehan suara partai politik dan suara calon Model C-1 Plano milik Pemohon. Kemudian, dicocokkan dengan foto data rincian perolehan suara partai politik dan suara calon Model C-1 Plano milik panwas dan data rincian perolehan suara partai politik dan suara Model C-1 Plano yang hasilnya adalah sama, yaitu 4 suara. Setelahnya, semua pihak kemudian menyesuaikan bahwa suara Partai Nomor 1 PKB adalah 4 suara.

Yang ketujuh. Bahwa setelah penghitungan di TPS 9, Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan dianggap selesai, maka penghitungan dilangut ... dilanjut ... dilakukan ke TPS selanjutnya, yaitu TPS 10 dan TPS 11. Tetapi pada saat penghitungan di TPS 11, tiba-tiba saksi PKB meminta agar dilakukan penghitungan kembali di TPS 9 dan langsung disetuzu ... disetujui oleh PPK untuk membuka kotak suara dan melakukan penghitungan ulang surat suara dengan hasilnya Partai PKB bertambah 1 suara. Dalam hal ini, terlihat persandingan C-1 Pemohon, vide Bukti P-5 dengan DAA-1 Termohon Bukti P-6 sebagai berikut.

Perolehan suara Partai PKB berda ... menurut Pemohon berdasarkan DAA-1 adalah 5, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan C-1 adalah 4. Selisih=1 suara.

223. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, yang angka 8, 9, dan 10 dianggap dibacakan. Langsung menjelaskan tabel ini saja. Persilakan!

224. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya.

225. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Tabel halaman 12.

226. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya, terima kasih, Majelis Yang Mulia. Berdasarkan uraian-uraian tersebut, menurut kami di tabel ini bahwa perolehan yang benar seharusnya Partai PKS menurut Termohon itu memperoleh suara=5.138 kurs ... 5.138 ... 38, sedangkan PKS itu hanya memperoleh 1 kursi. Seharusnya ... seharusnya berdasarkan C-1 yang dimiliki oleh Pemohon, suara PKS adalah 5.139 dan PKS memperoleh 2 kursi. Mendapatkan 2 kursi, 1 kursi dibagi 1, kemudian 1 kursi dibagi 3, yaitu 5.139 dibagi 3=1.100 ... 1.713 suara.

227. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi, hanya selisih 1 suara (...)

228. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Selisih 1 suara (...)

229. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Bisa mendapat ... menambah 1 kursi, ya?

230. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Bisa (...)

231. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Begitu, ya?

232. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Karena ini kursi yang harusnya PKS mendapat ... Pemohon mendapatkan 2 kursi di dapil ini, Yang Mulia.

233. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya ... ya, baik. Karena metodenya sekarang seperti itu, ya?

234. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya, Yang Mulia.

235. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus, lanjut!

236. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Kemudian, Partai PKB menurut Termohon (...)

237. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar! Kasih jeda sedikit kan sore-sore ini agak santai kita. Tapi Anda tahu kan bahwa tugas Mahkamah itu tidak menetapkan kursi kan?

238. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya.

239. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, kami hanya menetapkan, "Oh, ini suara tuh ternyata bukan suara partai a, partai b." Urusan itu jadi kursi atau tidak, itu urusan di sana tuh, ya?

240. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Siap, Yang Mulia.

241. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Jadi jangan perintah pula nanti kita menetapkan kursi untuk PKS. Nah, jadi repot nanti gantikan kerja KPU kita.

242. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Siap, Yang Mulia.

243. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah.

244. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Insya Allah nanti akan kami buktikan, Yang Mulia.

245. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bukan soal buktinya. Pemahaman soal konsepnya dulu, ya?

246. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Siap. Terima kasih.

247. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Paham atau siap?

248. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Paham, Yang Mulia.

249. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Nah, itu yang paling penting. Kalau *siap* sama dengan apa itu ... polisi. "Siap datang." Siap terus itu, begitu.

250. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Kemudian, kami lanjutkan. Izin (...)

251. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Lanjut!

252. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Yang Mulia, sedangkan suara Partai PKB, menurut Termohon itu adalah 1.713, memperoleh 1 kursi. Seharusnya, suara PKB menurut Pemohon adalah 1.712 dan tidak mendapatkan kursi karena selisih=1 suara dari Partai PKS, yaitu suaranya 1.713 suara.

253. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik.

254. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Kemudian, TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, ini bahwa terjadi pengurangan perolehan suara Pemohon di TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, sebanyak 1 suara dikarenakan adanya pembukaan suara dan penghitungan suara ulang dalam ini terlihat perbandingan antara C-1 Pemohon (Bukti P-7) dengan DAA-1 Termohon (Bukti P-8) sebagai berikut.

Partai ... perolehan suara Partai PKS menurut Termohon berdasarkan DAA-1 adalah 43, sedangkan menurut Pemohon berdasarkan C-1 adalah 44, selisih=1 suara.

Yang ke-12 bahwa di TPS 9 ini, Yang Mulia, selain terdapat permasalahan yang telah ditemukannya adanya 1 pemilih DPTb di TPS 8

Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat yang memiliki suara. A. Presiden ditunjukkan dengan Formulir Model C-1 PPP, vide Bukti P-9.

Sedangkan, B. DPR RI ditunjukkan dengan Formulir Model C-1 DPR, Bukti P-10.

C. DPD ditunjukkan dengan Formulir Model C-1 DPD, Bukti P-11.

D. DPRD provinsi ditunjukkan dengan Formulir Model C-1 DPRD provinsi, Bukti P-12.

E. DPRD kota ditunjukkan dengan Formulir Model C-1 DPRD kabupaten/kota, vide Bukti P-7.

255. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke tabel, ya. Saya kira udah kita mengerti a, b yang poin ke-13 itu (...)

256. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya.

257. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Langsung ke halaman 14 (...)

258. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Sebentar dulu, Pak.

Ini kan DPTb ini kan ndak mungkin 5 kan kata Anda, kan?

259. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya.

260. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu dia menggunakan 5-5 nya, termasuk untuk DPRD kota, ya?

261. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya, betul.

262. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Yang dipersoalkan ini?

263. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya.

264. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu itu Anda bisa pastikan ndak ke mana dia memilihnya?

265. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Apa ... insya Allah bisa, Yang Mulia. Tapi memang di sini kami bukan pada dasarnya untuk membuktikan penggunaan DPT itu pemilih (...)

266. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Atau paling tidak, begini, Anda asumsikan yang lebih 1 itu pilihannya lebih ke PKB, begitu?

267. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Tidak, Yang Mulia.

268. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terus ke mana?

269. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Tapi yang kami dalilkan di sini bahwa penggunaan DPTb ... DPTb dengan menggunakan hak untuk memilih 5 surat-surat suara dari mulai DPRD kota sampai presiden ini menyalahi prosedur aturan begitu, Yang Mulia.

270. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Saksi Anda di tempat kejadian itu mengajukan keberatan ndak?

271. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ada, Yang Mulia.

272. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ada buktinya, ya?

273. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya.

274. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

275. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, lebih dijelaskan tabelnya ini (...)

276. KETUA: ASWANTO

Ada atau mengajukan keberatan ... tunggu sebentar!

277. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke.

278. KETUA: ASWANTO

Ada atau mengajukan keberatan? Ada saksi?

279. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ada saksi.

280. KETUA: ASWANTO

Dan mengajukan keberatan?

281. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Dan mengajukan keberatan, Yang Mulia.

282. KETUA: ASWANTO

Mengisi Form C-2?

283. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Saat di kap ... pleno di KPUD Kota Metro, Yang Mulia.

284. KETUA: ASWANTO

Ndak. Mengisi Form C-2? Betul KPU, ya? C-2 itu keberatan, ya? Ya, Form Keberatan C-2. Ada ndak? Anda belum dapat buktinya? Yang jelas saksi Anda hadir di tempat itu?

285. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Hadir, Yang Mulia.

286. KETUA: ASWANTO

Tanda tangan ndak direkapitulasi?

287. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Tidak, Yang Mulia.

288. KETUA: ASWANTO

Tidak tanda tangan. Cuma Anda belum dapat bukti, apakah dia mengisi Form C-2 atau tidak, ya?
Tapi bahwa dia keberatan karena dia tidak tanda tangan, begitu?

289. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ada laporan apa ... saksi dari PKS itu mengajukan laporan ke Bawaslu Kota Metro, Yang Mulia, terhadap kejadian ini, Yang Mulia.

290. KETUA: ASWANTO

Terhadap kejadian itu dilaporkan?

291. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya, betul.

292. KETUA: ASWANTO

Ya, mestinya kalau ada keberatan juga kan harus diisi Formulir C-2 itu, ya. Bukti bahwa dia keberatan.
Cukup, Yang Mulia.

293. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik, dilanjutkan ke tabel ini menjelaskan penggunaan DPTb itu?

294. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya, terima kasih, Yang Mulia. Bahwa jumlah suara di DPTb antara Formulir C-1, vide Bukti P-7, dengan Formulir DAA-1, vide Bukti P-8, seharusnya berjumlah sama, yaitu 1 suara. Di Model C-1 ini DPTb, di PPWP, DPR RI I, DPD RI I, DPR provinsi I, DPRD kabupaten I, tetapi di DAA-1, kemudian di DAA-1, dan di Db ini jadi 0. Ini di apa ... dihilangkan, dicocokkan, begitu.

295. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Jadi menurut Saudara ini janggal ini?

296. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Janggal, Yang Mulia.

297. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Oke, tadi sudah dipertanyakan, apakah Saudara mengajukan keberatan, ya? Itu nanti belum dijawab.
Silakan, dilanjut!

298. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya. Bahwa penghilangan suara di DPTb tersebut bertentangan dengan ketentuan Pasal 505 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, yang pada pokoknya menegaskan penyelenggara yang karena kelalaiannya mengakibatkan hilang atau berubahnya Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara atau Sertifikat Rekapitulasi Perolehan Suara dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 tahun.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap TPS tersebut harus dilakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara dalam Pemilihan Umum.

299. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Terus?

300. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Bahwa hal tersebut juga telah diakui oleh saksi PKB dan Ketua PPK Kecamatan Metro Barat pada rekapitulasi tingkat Kota Metro dengan menyatakan ketua PPK, setelah pengecekan dari C-1 Plano saksi dari Partai Kebangkitan Bangsa masih mengajukan keberatan terhadap hasil pembetulan kepada PPK setelah pencocokkan dengan C-1 Plano suara partai politik dan caleg Partai PKB, serta adanya dugaan pemilihan DPTb ikut memberikan suara kepada pemilihan kota. Seketika itu PPK meminta pendapat dan rekomendasi panwaslu kecamatan yang hadir. Pernyataan ini dibuktikan dengan rekaman video pada menit ke 2 detik ke 3 sampai pada menit ke 2 detik ke 44, Bukti P-15.

Bahwa Pemohon mengajukan kembali di rapat pleno rekapitulasi di tingkat Provinsi Lampung dan terhadap semua kejadian tersebut, Pemohon melaporkan kejadian tersebut ke Bawaslu Kota Metro, Bukti P-16, serta ke Bawaslu Provinsi Lampung, Bukti P-17, untuk dapat ditindaklanjuti sebagaimana aturan yang berlaku.

Petitum. Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 987/PL.01.08-Kpt/06/KPU/V/2019 tentang Penetapan Hasil Pemilihan

Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota DPR, DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Secara nasional ... Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 tertanggal 21 Mei 2019 untuk pemilihan anggota DPRD kabupaten/kota sepanjang di dapil pilihan Kota Metro, Daerah Pemilihan Metro IV, Kecamatan Metro Barat dan Metro Selatan.

3. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum untuk melakukan Pemungutan Suara Ulang atau PSU pada TPS 8 Kelurahan Ganjar Asri, Kecamatan Metro Barat, Daerah Pemilihan Kota Metro IV.
4. Menetapkan poroleh ... perolehan suara yang benar untuk Pemohon untuk pengisian keanggotaan DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota di beberapa daerah pemilihan sebagai berikut.
 - a. Perolehan suara pemohon partai politik calon anggota DPR dan DPRD di Provinsi Lampung. Perolehan suara Pemohon partai politik untuk pengisian keanggotaan DPRD kabupaten/kota, Pemohon menyampaikan perolehan suara yang benar menurut Pemohon adalah sebagai berikut.

Kota Metro, Dapil Metro IV, perolehan partai di TPS 2 Kelurahan Margorejo, Kecamatan Metro Selatan, suara partai:

 1. PKS perolehan suaranya=40.
 2. Suara Partai PKB perolehan suaranya=32.

Perolehan suara di TPS 9 kelurahan ... izin, Yang Mulia, merenvoi, ini ada kesalahan pengetikan.

301. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya.

302. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Di situ tertulis *Argomulyo* yang benar adalah Rejomulyo, Yang Mulia.

303. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ya, silakan!

304. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Perolehan di TPS 9 kel ... Kelurahan Rejomulyo, Kecamatan Metro Selatan:

1. Partai PKB perolehan suara=4.

5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini atau apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terima kasih, Majelis Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb.

305. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Baik. Sudah seluruhnya, ya?

306. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Sudah.

307. HAKIM ANGGOTA: MANAHAN MP SITOMPUL

Ndak ada lagi permohonan lain, ya? Untuk Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 dari Partai Keadilan Sejahtera, kami anggap sudah selesai. Dan berkas yang 4 ... berkas sudah selesai, Yang Mulia. Saya kembalikan kepada Yang Mulia Ketua Panel.

308. KETUA: ASWANTO

Silakan, Prof. Ada tambahan?

309. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia.

Ini saya kembali ke soal DPTb, ya. Di poin 16 itu kan Anda mengutip. Coba lihat di halaman 14 poin 16 bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka terhadap TPS tersebut harus melakukan pemungutan suara ulang sesuai dengan ketentuan Pasal 65 ayat (2) huruf d PKPU 9/2019 tentang Perubahan PKPU Nomor 3 Tahun 2019 tentang Memungutan Suara dalam Pemilu. Anda mengajukan ini enggak ketika kejadian itu di TPS? Melaporkan ndak? Sehingga bisa dilakukan PSU?

310. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Sudah, tapi waktunya habis.

311. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Sudah, Yang Mulia, tapi apa ... waktu itu kami kehabisan waktu, Yang Mulia.

312. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Kehabisan waktu ini maksudnya, gimana ini?

313. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Izin, Yang Mulia. (...)

314. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

315. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Ketika kami menyampaikan ke KPU batas waktunya itu kan 10 hari setelah pemungutan suara (...)

316. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya.

317. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Dan kami menemukannya di hari ke 9 dan KPU berpendapat tidak cukup waktu lagi untuk melakukan PSU.

318. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Oke.

319. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Begitu, Yang Mulia.

320. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tapi itu sudah disampaikan (...)

321. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Sudah kami sampaikan.

322. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Bawaslu, ya?

323. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Ya, sudah kami sampaikan.

324. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Dilaporkan tanggal 10 (...)

325. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Tanggal 9, Yang Mulia.

326. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Tanggal 9 ... 9 hari ke 9, ya?

327. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Hari ke 9, Yang Mulia.

328. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Berarti itu tanggal 26?

329. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Ya.

330. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya, ya? Kira-kira kan tanggal 26 itu?

331. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Ya, Yang Mulia.

332. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Lalu kan mereka harus rapat juga, terus setelah rapat menetapkan, memerintahkan dilakukan pemungutan suara ulang, sehingga kemudian tidak dimungkinkan dilakukan. Kira-kira begitu, ya?

333. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SULTAN

Ya, Yang Mulia.

334. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA

Ya. Itu kan Anda harus paham juga itu apa ... soal keterbatasan-keterbatasan seperti ini. Itu 1.

Yang ke 2 apa lagi tadi itu? Ini Rejomulyo sudah diubah, ya? Karena di dalamnya Rejomulyo, gitu. Oke, itu saja, Pak Ketua. Terima kasih.

335. KETUA: ASWANTO

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Sekarang kita sahkan alat bukti. Pertama dari Partai Berkarya, bukti yang Saudara masukkan P-1.7 ... P-7.1 sampai dengan P-7.39?

336. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: ISNALDI

Ya, benar, Yang Mulia, betul.

337. KETUA: ASWANTO

Ya, kita sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Kemudian untuk Partai Golkar, ini bagaimana ini? Petugas ... Petugas, untuk Golkar belum muncul, ya? Baik. Dan tidak ada informasi, ya? Tidak serius.

Untuk ... ya, ini karena kita sudah memberi kesempatan, tadi pada awal sidang kita sudah menyampaikan untuk Partai Golkar karena di awal belum hadir dan kita menyampaikan bahwa kita memberi waktu sampai selesainya Para Pemohon mempresentasikan Permohonannya. Dan ternyata sampai selesainya permoho ... Pemohon mempresentasikan, ternyata Golkar belum juga hadir, sehingga kita menganggap bahwa kami, Panel, sepakat bahwa Permohonan ini dianggap gugur. Dinyatakan gugur, ya. Permohonan ini dinyatakan gugur. Sehingga, kami tidak perlu mengesahkan alat buktinya.

Kemudian, Partai Hanura. Bukti yang diajukan A-01 sampai dengan PL-Z.01, betul, ya?

338. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Betul, Yang Mulia.

339. KETUA: ASWANTO

Ya, ini kodenya agak lain, ini, ya. Kemudian P-47 sampai dengan P-56?

340. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Betul, Yang Mulia.

341. KETUA: ASWANTO

P-1.1 sampai dengan P-1.28?

342. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Betul, Yang Mulia.

343. KETUA: ASWANTO

Betul. Ada catatan untuk PL-X.06, daftar alat bukti dan alat buktinya tidak sesuai, ya.

344. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Baik, Yang Mulia.

345. KETUA: ASWANTO

PL ... PL (...)

346. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

PL.

347. KETUA: ASWANTO

PL ... 06 (...)

348. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

06.

349. KETUA: ASWANTO

PL- (...)

350. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

X.06.

351. KETUA: ASWANTO

X.06. Itu daftar alat bukti dan bukti fisik tidak sesuai. Nanti diluruskan di bagian Kepaniteraan, ya.

352. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Baik, ya, terima kasih, Yang Mulia.

353. KETUA: ASWANTO

Ini juga belum disahkan nanti.

Kemudian P-1.13, ini juga daftar alat bukti dan bukti fisik tidak sesuai. Kita sahkan bukti-bukti yang sudah sesuai, kecuali PL-X.06 dan P-1.13 kita belum sahkan. Nanti di ... di cocokkan dulu di bagian Kepaniteraan. Selain itu, kita sahkan yang kami sudah verifikasi

354. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: JAYEN SUWARSIATNA

Baik, terima kasih, Yang Mulia.

355. KETUA: ASWANTO

Kemudian, PKS ... PKS untuk DPRD Kota Metro IV, Lampung, ya, bukti yang diajukan P-1 sampai dengan P-17, betul, ya? PKS ... mana PKS tadi?

356. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya, betul, Yang Mulia.

357. KETUA: ASWANTO

Ada catatan, Bukti P-2 ... di Bukti P-2, daftar ... di daf ... di daftar alat bukti, Kelurahan Metro Selatan, tetapi di bukti fisiknya Kelurahan Margorejo ... Margorejo, ya. Itu nanti di ... dikonfirmasi kembali ke bagian Kepaniteraan.

Saya ulangi, Bukti P-2 pada daftar alat bukti yang Saudara serahkan, itu Kelurahan Metro Selatan. Tetapi, bukti fisiknya di keluh ... Kelurahan Margorejo, ya. Nanti disinkronkan, ya.

358. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya, Yang Mulia.

359. KETUA: ASWANTO

Kemudian, ini Bukti P-3 ini foto, tetapi kami enggak bisa melihat apa-apa, kabur. Ini kalau ... kalau Anda mau memperbaiki, silakan! Kalau tidak, ya, kami terpaksa menyatakan kabur, saja. Nggak ada yang bisa kita lihat. Ini ... ini jangan dikira Mahkamah karena banyak bukti, lalu tidak diperiksa. Semua bukti, ya, kami serius untuk memeriksa.

Kemudian, Bukti P-14. Daftar alat bukti terlampir ... terlampir Form DB. Tetapi, bukti fisik Form DB-2 DPRD, ini nanti disinkronkan, ya?

360. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Ya, Yang Mulia.

361. KETUA: ASWANTO

Nah, P-1 sampai P-17, itu kita sahkan, kecuali P-2, P-3, dan P-14, kita belum sahkan, ya. Karena masih harus disinkronkan kembali.

KETUK PALU 1X

Baik, penyampaian untuk penundaan sidang. Sidang berikutnya dijadwalkan hari Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2010 ... oh sori, saya yang ... pengelihatannya saya yang salah, padahal sudah betul tulisannya *2019*. Ini karena sudah ngantuk mungkin.

362. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Izin, Yang Mulia.

363. KETUA: ASWANTO

Apa itu?

364. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Kalau diperkenankan untuk bertanya, Yang Mulia.

365. KETUA: ASWANTO

Apa yang Anda mau tanyakan?

366. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Terkait dengan apa ... Bukti P-3, foto C-1 Plano yang apa ... terlihat kabur itu, Yang Mulia (...)

367. KETUA: ASWANTO

Ya.

368. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Karena kalau difotokopi kan memang agak kabur, tetapi kalau memang diperkenankan, kalau ditayangkan itu terlihat, Yang Mulia.

369. KETUA: ASWANTO

Ya, nanti berhubungan dengan bagian Kepaniteraan.

370. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019: SIDIK EFENDI

Baik, Yang Mulia, terima kasih.

371. KETUA: ASWANTO

Baik, saya ulangi untuk sidang berikutnya hari Selasa, tanggal 16 Juli tahun 2019, pukul 10.30 WIB, ya. Agenda kita adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Bukti Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Ini untuk Provinsi Banten. Jadi Lampung belum kita sebut. Nah, untuk Banten, pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi dan Mahkamah tidak melakukan pemanggilan tertulis lagi, ya.

Kemudian, perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu diajukan paling lambat hari Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2019, pukul 12.00 WIB.

Kemudian, untuk ... khusus untuk Provinsi Lampung, Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, tadi Perkara Nomor 206-07-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, 169-04-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, dan 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Provinsi Banten itu hari Selasa, tanggal 16 Juli 2019.

Untuk Perkara Nomor 06-08-09/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019, Provinsi Lampung, sidang berikutnya adalah hari Selasa, tanggal 16 Juli, tahun 2019, waktunya pukul 13.30 WIB. Jadi, harinya sama, cuma jamnya beda. Yang Banten tadi pukul 10.30 WIB, yang Lampung pukul 13.30 WIB. Acaranya adalah Mendengarkan Jawaban Termohon, Keterangan Bawaslu, Keterangan Pihak Terkait, dan Pengesahan Bukti Termohon, Bawaslu, dan Pihak Terkait. Pemberitahuan ini berlaku sebagai panggilan resmi dan Mahkamah tidak akan menyampaikan panggilan tertulis lagi.

Lalu, perbaikan jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait, dan keterangan Bawaslu diajukan paling lambat hari Jumat, tanggal 12 Juli tahun 2019, pukul 12.00 WIB. Jelas, ya? Enggak ada lagi yang mau berkomentar kan? Cukup, ya?

Baik, dengan demikian sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 17.11 WIB

Jakarta, 10 Juli 2019
Panitera,

ttd.

Muhidin
NIP. 19610818 198302 1 001

Risalah persidangan ini adalah bentuk tertulis dari rekaman suara pada persidangan di Mahkamah Konstitusi, sehingga memungkinkan adanya kesalahan penulisan dari rekaman suara aslinya.